



## **IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

**Natelda R Timisela<sup>1)</sup>, Ester D. Leatemia<sup>2)</sup>, Febby J. Polnaya<sup>3)</sup>, Esther Kembauw<sup>4)</sup>,  
Meitycorfrida Mailoa<sup>5)</sup>, Neima Nurjannah<sup>6)</sup>, Meivie Matulesy<sup>7)</sup>, Hayati  
Latuconsina<sup>8)</sup>, Rosana Tuharea<sup>9)</sup>, Ismi Fitriani<sup>10)</sup>, Sherly Amelia Ayhuan<sup>11)</sup>**

1,2,3,4,5) Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

6,7,8,9,10,11) Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

### **Abstrak**

Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Inpres bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa/kelurahan. Perkembangan kampung KB di propinsi Maluku cukup baik karena telah terbentuk kampung KB hampir di seluruh kabupaten/kota. Hal ini menjadi penting karena untuk meningkatkan keakuratan data kependudukan maka melalui kampung KB maka ketersediaan data penduduk akan semakin baik. Jumlah kampung KB di Propinsi Maluku sebanyak 400 dengan klasifikasi dasar sebanyak 83,29%, berkembang sebanyak 12,66%, mandiri sebanyak 0,75% dan berkelanjutan sebanyak 3,29%. Terlihat bahwa klasifikasi kampung KB pada kabupaten/kota penyebarannya belum seimbang. Perlu pendampingan kader kampung KB supaya terus mengarah ke fase berikutnya. Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang untuk mengubah pola perilaku masyarakat untuk menyiapkan gizi seimbang dari dalam keluarga.

**Kata Kunci:** Kampung KB, stunting, pemberdayaan, berkualitas, dashat.

---

\*Correspondence Address : [nateldatimisela@gmail.com](mailto:nateldatimisela@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i2.2023.572-582

© 2023UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana pada UU No.52 Tahun 2009 menekankan kewenangan BKKBN tidak hanya terbatas untuk masalah pembangunan KB dan KS namun berkaitan dengan masalah pengendalian penduduk (Ramadhani dan Tukiman, 2020).

Perwujudan dari pelaksanaan agenda prioritas Nawacita ke 3,5, dan 8 sebagai Langkah BKKBN untuk mencanangkan kampung KB. Nawacita ke-3 membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam bingkai negara kesatuan. Nawacita ke-5 meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Nawacita ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan Kembali kurikulum Pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek Pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek Pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Presiden RI memberikan amanat kepada BKKBN untuk menyusun kegiatan/program yang bisa memperkuat pencapaian target/sasaran pembangunan dalam upaya pengendalian penduduk dan KB tahun 2015-2019. Kegiatan tersebut menjadi ikon BKKBN untuk bersentuhan langsung dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia di seluruh wilayah (Ramadhani dan Tukiman, 2020).

Pemerintah berupaya untuk fokus pada program KB melalui penerapan inovasi baru yaitu pembentukan kampung KB sebagai agenda prioritas pembangunan nawacita dengan tiga agenda yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai bentuk reorientasi kebijakan

pemerintah, kampung KB tidak hanya fokus untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tetapi lebih ditekankan pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga perlu menjadi perhatian karena keluarga memiliki peran dan nilai strategis untuk menunjang pembangunan yang berhasil dan berkualitas. Melalui keluarga maka akan terbentuk sumberdaya manusia yang berkualitas. Program kampung KB mulai dirintis tahun 2016 yang didesain sebagai pola pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kampung KB tersebut. Prinsip pengelolaan kampung KB adalah dari, oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk pembangunan masyarakat. Pemerintah melakukan pendampingan dan memberikan stimulasi selanjutnya masyarakat yang berproses dan bertanggung jawab. Pendekatan kampung KB dimulai di tingkat desa/kelurahan secara terintegrasi dan confidence untuk pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dan masyarakat pada seluruh dimensi dalam upaya peningkatan kualitas SDM. Diawal pembentukan Kampung KB untuk nama Kampung KB merupakan Kampung Keluarga Berencana, namun sejak terbit surat edaran Mendagri Nomor 843.4/2879/SJ tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas maka berubahlah nama Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.

Kampung keluarga berkualitas sebagai sebuah model percepatan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif melalui pendekatan individu, keluarga dan masyarakat. Diharapkan kampung KB dapat menghasilkan keluarga berkualitas, tentram, mandiri dan Bahagia yang berkontribusi pada pembangunan negara.

Masyarakat harus sadar dalam hal pembangunan berwawasan kependudukan misalnya peran dalam

mengikuti program KB. Dalam bidang pendidikan dan perekonomian, yakni diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah dan Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS. Dan tak kalah penting juga tujuan Kampung KB adalah meningkatkan kualitas kelompok PIK KRR/Remaja sehingga terdapat rasa kebangsaan dan cinta tanah air bagi para remaja. (BKKBN, 2015).

Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam optimalisasi penyelenggaraan kampung KB untuk peningkatan kualitas SDM dan memberdayakan keluarga. Fokus kampung KB antara lain meningkatkan akses pelayanan Kesehatan didalamnya ada KB dan Kesehatan reproduksi yang berbasis masyarakat, meningkatkan cakupan dan akses Pendidikan, meningkatkan layanan jaminan dan perlindungan social untuk keluarga dan masyarakat miskin dan rentan. Pemberdayaan ekonomi keluarga dan melakukan kegiatan pendampingan serta pelayanan untuk keluarga beresiko stunting. Prioritas nasional adalah penanganan stunting yang membutuhkan keterlibatan semua elemen pada berbagai sektor terkait. Kampung KB menjadi program pemerintah yang kegiatannya dapat dikonvergensi untuk menangani stunting. Kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah perlu disinergikan di kampung KB untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan kampung KB dalam upaya penurunan stunting. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kampung KB sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Maluku.

#### **METODE PENELITIAN**

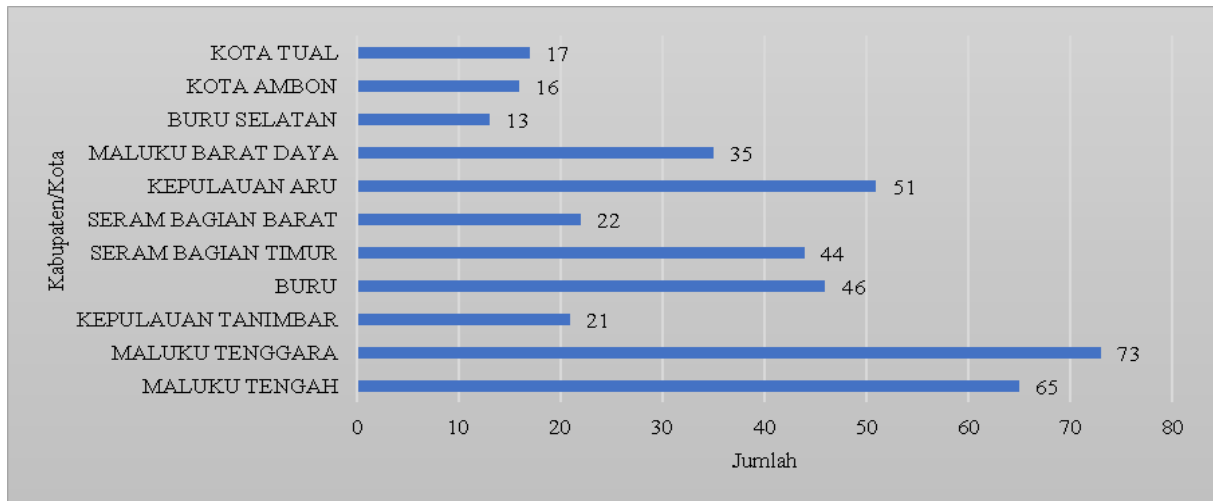
Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang diperoleh dari sumber informasi diperoleh dari objek peneliti

yang berasal dari literatur yang tersedia baik dalam bentuk buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, serta sumber-sumber ilmiah yang ada. Data-data yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif yang dianalisa menjadi satu kesatuan informasi yang berkualitas. Studi pustaka yang berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian (review of research) (Mulyadi, 2012). Penelitian dilakukan pada Oktober hingga Desember 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jumlah kampung KB yang terbentuk di Propinsi Maluku yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Terlihat bahwa kampung KB terbanyak di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu 73 kampung, kemudian Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 65 kampung dan Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 51 kampung. Hal ini berarti bahwa kepedulian pemerintah untuk memperhatikan terbentuknya kampung-kampung KB pada setiap kabupaten/kota cukup signifikan. Dengan adanya kampung KB di setiap kabupaten/kota maka akan mendukung penguatan keluarga dan meningkatkan kualitas SDM. Kampung KB sebagai sebuah pendekatan universal untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat.

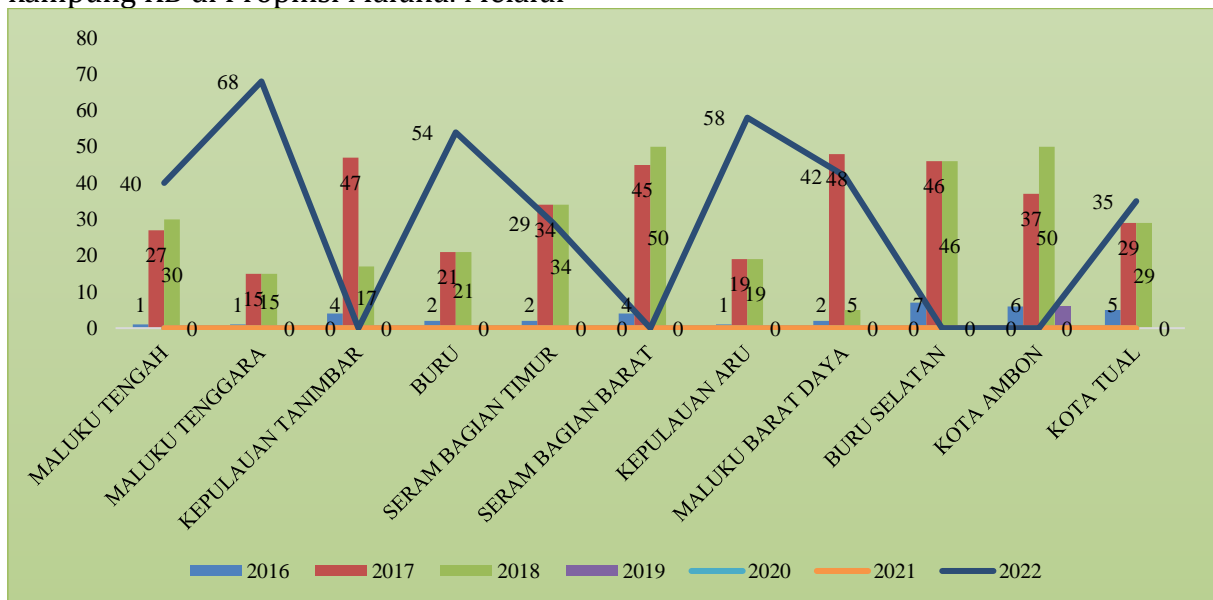
Keberhasilan penyelenggaraan kampung KB diukur melalui pengamatan pelaksanaan program yang terencana dan terlaksana. Proses pengamatan menggunakan website kampung KB dimana harus dilaporkan secara tersistem dan dipantau setiap saat. Pengukuran dampak kampung KB menggunakan indeks pembangunan keluarga (i-bangga).



Gambar 1. Jumlah Kampung KB Berdasarkan Kabupaten Kota  
 Sumber: BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2022

Pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga akan diperoleh hasil tentang gambaran peran dan fungsi keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan keluarga. Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan pembentukan kampung KB di Propinsi Maluku. Melalui

kampung KB yang sudah terbentuk pada setiap desa di kabupaten/kota akan sangat membantu masyarakat untuk mengintegrasikan semua program dan kegiatan yang disalurkan pemerintah dengan pendekatan siklus kehidupan manusia karena kampung KB yang diimplementasikan secara baik akan sangat memberikan pengaruh pada percepatan penurunan stunting.



Gambar 2. Periode Pembentukan Kampung KB (2016-2022) di Propinsi Maluku  
 Sumber: BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2022

Gambar 2 menunjukkan priode pembentukan kampung KB di Maluku. Terlihat bahwa setiap tahun proses pembentukan kampung KB berlangsung sangat baik, namun pada tahun 2021

tidak ada proses pembentukan kampung KB dikarenakan covid-19 yang melanda dunia sehingga semua aktivitas terhenti. Namun di tahun 2022 pemerintah terus berupaya untuk membentuk kampung

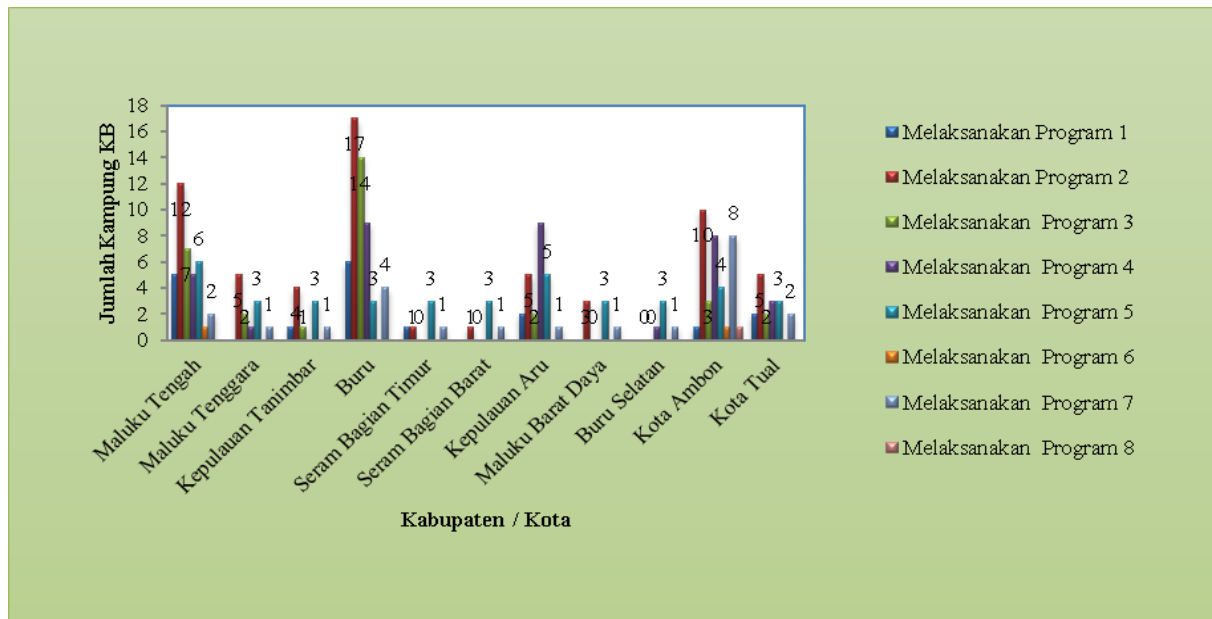
KB secara massif pada seluruh kabupaten/kota. Terlihat periode pembentukan kampung KB di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Buru, Maluku Barat Daya dan Kota Tual cukup signifikan kenaikannya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah daerah untuk membentuk kampung KB sangat baik karena sangat berkaitan dengan peningkatan keluarga berkualitas. Berbagai kegiatan yang dilakukan di kampung KB seperti intensifikasi dan ekstensifikasi bangga kencana yang berperan penting dan strategis untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Melalui kampung KB juga penting untuk menghasilkan program membangun rumah data, sehingga data kependudukan dan KB kedepannya akan selalu tersedia di rumah data yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkannya. Rumah data berfungsi untuk menyediakan semua data masyarakat mulai dari penduduk berusia 0-5 tahun bahkan sampai usia lanjut.

#### ***Kegiatan Kampung KB Menurut Program dan Dampaknya***

Kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah mewujudkan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga. Program KB sebagai upaya perencanaan penduduk yang komprehensif, fundamental dan strategis untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan sehat (Angisna, 2018). Pemerintah mencanangkan program KB namun terkendala sehingga disempurnakan menjadi program kampung KB sebagai sebuah strategi pembangunan berwawasan kependudukan (Nugroho, 2018). Kampung KB dibangun dan dikeroyok Bersama oleh semua instansi. Melalui kampung KB maka masyarakat Bersama-sama menghadirkan pemerintah mulai dari pinggiran yakni dari desa ke kota. Masyarakat akan

merasa diperhatikan ketika terbentuknya kampung KB maka perhatian pemerintah akan semakin serius mulai dari kota sampai ke pelosok terpencil.

Pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2022, ada 8 program Kampung KB yaitu : 1) Penyediaan data dan administrasi kependudukan, 2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), 3) Peningkatan akses Keluarga Berencana melalui program kesehatan berbasis masyarakat (PKBM) dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), 4) Pendampingan resiko kejadian stunting, 5) peningkatan akses pendidikan, 6) Peningkatan cakupan layanan jaminan, 7) pemberdayaan ekonomi keluarga, 8) Penataan lingkungan keluarga. Kampung KB di Maluku berjumlah 440 kampung belum semua melaksanakan 8 program yang diturunkan dari pemerintah. Kampung KB yang sudah melaksanakan 8 program pemerintah di Maluku berjumlah 213 kampung, sisanya belum melaksanakan kegiatan dalam 8 program dan ada juga kampung KB yang belum mengimput kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai bahan pelaporan pada website kampung KB (Gambar 3).



**Gambar 3. Jumlah Kampung KB Yang Melaksanakan 8 Program.**

Sumber: <https://kampungkb.bkkbn.go.id>

Gambar 3 memperlihatkan bahwa pelaksanaan program 2 yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) gencar dilakukan. Hal ini penting karena kesehatan itu sangat mahal. Ketika orang sakit jika tidak berobat karena tidak ada uang maka hidup akan sia-sia. Lingkungan yang tidak bersih akan mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu germas akan sangat bermanfaat bagi masyarakat supaya terhindar dari berbagai resiko penyakit yang berbahaya. Kemudian program 4 yaitu pendampingan resiko kejadian stunting yang terus dilakukan oleh BKKBN dan pihak terkait yaitu dinas kesehatan dan layanan-layanan kesehatan. Ini penting karena melalui kampung KB maka pendataan anak-anak beresiko stunting akan terdata dengan baik dan kegiatan-kegiatan aksi untuk percepatan penurunan stunting dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Marwah Kampung KB yakni satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang

dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

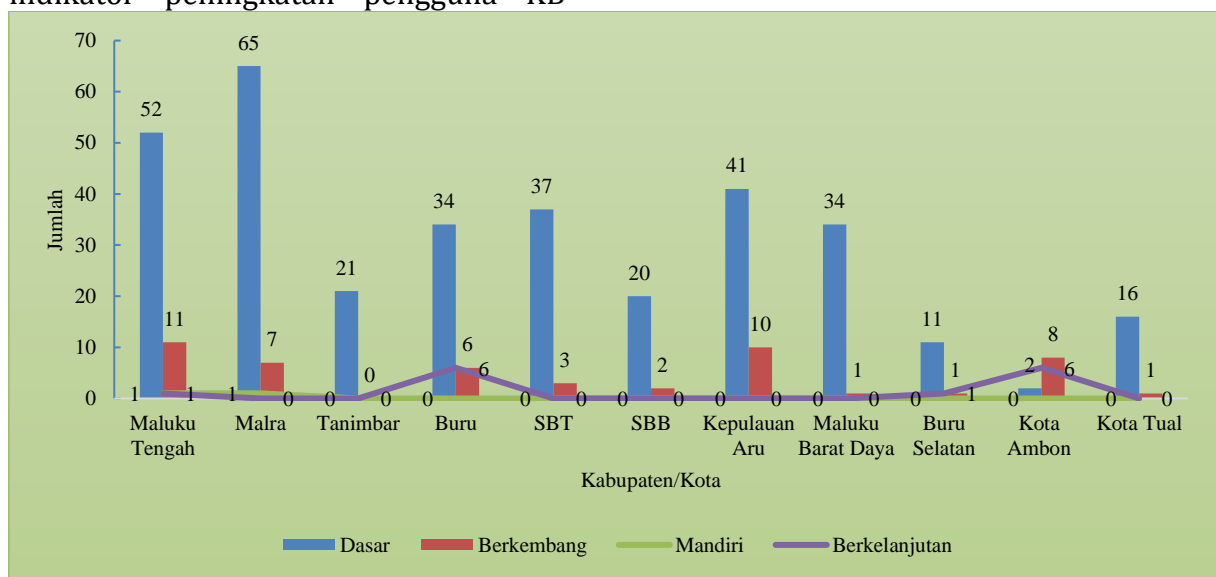
### **Klasifikasi Kampung KB**

Secara umum pengklasifikasian ditujukan untuk melakukan pemetaan perkembangan pengelolaan dan kinerja Kampung KB. Sedangkan secara khusus bertujuan melakukan penilaian terhadap indikator performan dari masing-masing kampung KB dalam kriteria kurang, cukup, baik, dan Baik Sekali; menghitung nilai indek dari variabel input, proses dan output; menetapkan klasifikasi kampung KB dalam kriteria dasar, berkembang, mandiri dan paripurna; melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada kampung KB berdasarkan klasifikasi. Klasifikasi kampung KB pada kabupaten/kota penyebarannya belum seimbang. Terlihat bahwa kampung KB pada tingkatan dasar sangat dominan. Perlu pendampingan kader kampung KB supaya terus mengarah ke fase berikutnya. Untuk fase berkelanjutan terlihat bahwa di Kota Ambon terdapat 6 desa, Kabupaten Buru 6 desa, Kabupaten Buru Selatan 1 desa dan Kabupaten Maluku Tengah 1 desa. Hal ini berarti bahwa pengelolaan kampung KB

dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaiannya.

Program kampung KB sebagai bentuk realisasi upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan indikator KKBPK. Ketercapaian program dinilai dari dua aspek yaitu aspek pengendalian kuantitas penduduk dan aspek peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Aspek yang kedua dinilai dengan indikator peningkatan pengguna KB

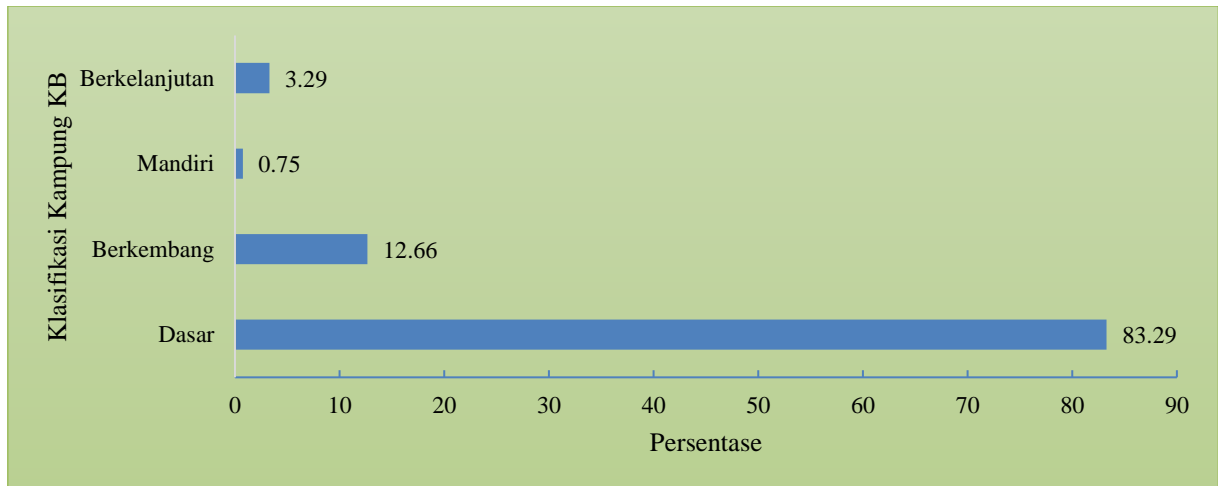
baru, peningkatan jumlah ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah remaja yang aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R), penurunan jumlah perempuan yang buta aksara, peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera dan KS-1 dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (Zuhriyah, Indarjo, and Raharjo 2017).



Gambar 4. Tren Klasifikasi Kampung KB di Propinsi Maluku  
 Sumber: BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2022

Gambar 4 menampilkan kampung KB yang berada pada fase mandiri terdapat pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing 1 desa. Ini berarti bahwa kampung KB sudah berjalan sesuai dengan harapan namun belum memiliki

kontribusi terhadap pencapaiannya. Perlu pendampingan secara kontinu untuk peningkatan kampung KB ke fase berikutnya. Secara keseluruhan gambaran capaian performa kampung KB di Propinsi Maluku ditampilkan pada gambar 5.



Gambar 5. Capaian Performa Kampung KB Propinsi Maluku

Sumber: BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2022

Gambar 5 dan Tabel 1 menunjukkan bahwa klasifikasi dasar masih mendominasi di Propinsi Maluku. Hal ini dikarenakan Propinsi Maluku sudah memulai pembentukan kampung KB di setiap desa di seluruh kabupaten/kota. Namun belum seluruhnya berjalan secara baik, hal ini sesuai dengan penelitian Lifianti, 2021 bahwa Implementasi Program Kampung KB di Indonesia belum berjalan secara optimal karena baik dari segi ukuran dan tujuan, komunikasi, sumber dana serta sikap pelaksana masing-masing belum tercapai sepenuhnya sesuai harapan. Beberapa indikator seperti AKI, AKB, Droop Out KB, Unmet need dan lain-lain mulai tertangani namun perlu diperhatikan secara baik melalui kader-kader kampung KB. Perlu penguatan dari sisi pencegahan perkawinan anak dengan kelompok Generasi Berencana (GenRe), dengan kelompok Bina

Keluarga Balita (BKB), dengan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hasil penelitian Rahman dan Junaedi, 2019 menyatakan bahwa implementasi program Kampung KB dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program, yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Hasil penelitian Hasriani et al, 2021 menyatakan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB berdasarkan aspek sumber daya yang digunakan masih perlu dibenahi karena dengan alokasi anggaran dan dukungan sarana prasarana dari pemerintah pusat, penyuluh KB diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan program Kampung KB.

Tabel 1. Penetapan Tingkat Performan Kampung KB

Jenis Klasifikasi	Nilai Indikator	Keterangan
<b>Klasifikasi Dasar</b>	Nilai indeks input, proses dan output kurang dari 3 atau salah satu indeks dari input, proses dan output $\geq 3$	Pengelolaan kampung KB baik input maupun proses, keduanya belum dilaksanakan secara efektif dan belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian program
<b>Klasifikasi Mandiri</b>	Nilai indeks input dan proses lebih dari 3 tetapi indeks output masih kurang dari 3	Kampung KB sudah berjalan sesuai dengan harapan namun belum memiliki kontribusi terhadap pencapaian



<b>Klasifikasi Berkembang</b>	Nilai indek input dan proses lebih dari 3 tetapi indek output lebih dari 3	Kampung KB sudah memiliki kontribusi terhadap pencapaian
<b>Klasifikasi Berkelanjutan (paripurna)</b>	Nilai indek input, proses dan output mencapai lebih dari 3	Pengelolaan kampung KB dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian

Sumber: BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2022

### **Manfaat Kampung KB untuk Penurunan Stunting**

Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan program KKBPK kepada masyarakat dengan mengaktualisasikan 8 fungsi keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera. Kampung KB menjadi salah satu model miniatur pelaksanaan program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN secara sinergis dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia (Restiyani and Yasa, 2019). Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas (Nurdiawan, Pratama, and Rahaningsih, 2020).

Berkaitan dengan stunting, didalam kampung KB salah satu program prioritas adalah percepatan penurunan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga, kemudian pelayanan KB dan kesehatan, penanganan persoalan sosial. Pemanfaatan Kampung KB dan pemberdayaan kelompok masyarakat menjadi salah satu program yang dapat digunakan sebagai salah satu dari

berbagai upaya untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan hidup sehat sebagai salah satu upaya penurunan angka stunting. salah satu program keluarga berencana dalam membangun keluarga berkualitas adalah upaya pengendalian penduduk dengan cara mengatur jarak kelahiran, melakukan pendewasaan usia perkawinan dan penurunan angka kematian bayi, ibu hamil dan ibu melahirkan. Keberadaan kampung KB menjadi strategis dalam membangun keluarga berkualitas yang didalamnya terdapat upaya mencegah stunting melalui pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. kegiatan kader KB harus terus bersinergi dengan TP PKK dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui kegiatan pemberian makanan tambahan dan dapur balita guna menuntaskan stunting. pencegahan *stunting* oleh Kampung KB dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu *Pertama*, mengimplementasikan berbagai kegiatan pencegahan *stunting*, seperti memantau pertumbuhan balita melalui *screening* kesehatan dan pemberian makanan tambahan. *Kedua*, mendorong kerjasama lintas kelompok kegiatan, seperti BKB, BKR, PIK-R, UPPKS sangat berperan dalam pencegahan *stunting*.

Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) diharapkan mampu mengubah pola perilaku masyarakat, dalam penyediaan gizi seimbang yang dimulai dari keluarga. Dashat sebagai program pemberdayaan masyarakat

dalam upaya pemenuhan gizi seimbang. Jadi, seluruh keluarga yang memunyai risiko stunting, seperti ibu hamil, ibu menyusui, baduta (balita di bawah dua tahun), balita stunting, terutama dari keluarga kurang mampu, (terpenuhi gizinya) melalui pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk bahan pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya dari mitra lainnya. Kampung KB mempunyai andil terbesar untuk terus berupaya melalui berbagai program pemberdayaan untuk pencegahan stunting.

## **KESIMPULAN**

1. Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah. Intervensi pemerintah dalam hal ini BKKBN dan pemerintah desa untuk pembentukan Kampung KB harus terus digalakan agar ketersediaan data kependudukan, kepedulian terhadap penurunan stunting, pembatasan perwakiwan anak yang belum masuk usia pernikahan dan lainnya.
2. Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) bertanggung jawab secara operasional baik dari administrasi, perencanaan sampai pengendalian terhadap program di Kampung KB.
3. Upaya pencegahan stunting melalui implementasi program-program kampung KB seperti Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) diharapkan mampu mengubah pola perilaku

masyarakat, dalam penyiapan gizi seimbang yang dimulai dari keluarga. Dashat sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang. Jadi, seluruh keluarga yang memunyai risiko stunting

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Angisna, T. 2018. “Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kampung KB di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur”, *The Indonesian Journal of Health Protection and Health Education*, Departemen Biostatistika dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 6(1): 94.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2015. *Petunjuk Teknis Kampung KB, BKKBN*.
- Hasriani., Yunus, B., Hamsinah. 2021. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Spirit Publik*, 16(2): 137-149.
- Lifianti, K.A. 2021. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Jurnal Inovasi Sektor Publik* 1(1): 106-131.
- Mardiyono. 2017. “Kampung KB sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur (Studi di Kota Malang dan KabupatenBondowoso”, *Jurnal Cakrawala, Peneliti Madya Perwakilan BKKBN Jawa Timur*, 11(2): 131.
- Nugroho, M. R. 2018. *Sosialisasi Program Kampung Keluarga Berencana (kampung KB) di kelurahan puncang sawit, skripsi (Surakarta: Universitas muhammadiyah surakarta)*.
- Nurdiawan, O., Pratama, F. A., Rahaningsih, N. 2020. *PKM E-Commerce Kampung Keluarga Berencana Desa Mertasinga Kabupaten Cirebon. Madani: Indonesian Journal of Civil Society* 2(1): 1-8.
- Ramadhani, F.N., Tukiman. 2020. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Public Administration Journal of Research*, 2 (4): 376-392.

Rahman HM & Indrawadi, Junaedi. (2019). Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 110 Vol 2 No 4.

Restiyani, N. L. N., Yasa, IGWM. 2019. Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7): 11-40.

Zuhriyah, A., Indarjo, S., Raharjo, B.B. 2017. Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 1(4): 1-13.